

I. PENDAHULUAN

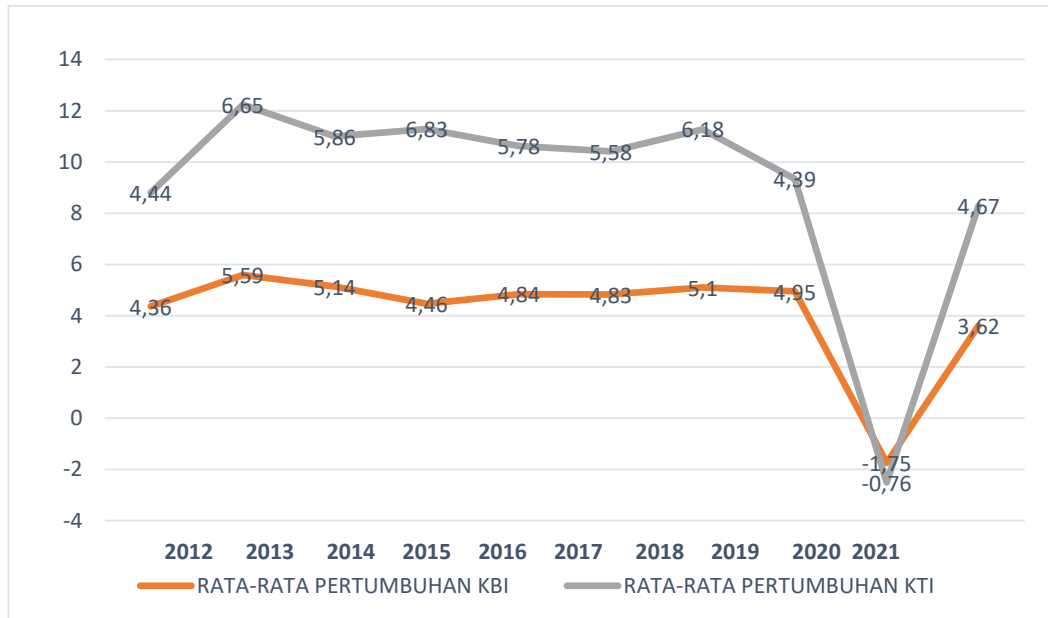
A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan realitas fisik sekaligus tekad masyarakat untuk berusaha semaksimal mungkin melalui serangkaian proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (Warsilan & Noor, 2015). Salah satu indikator untuk melihat pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi (Maqin, 2011). Hakim (2009) mengatakan bahwa hakikat pembangunan ekonomi adalah tumbuhnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan kegiatan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan adanya penurunan kegiatan ekonomi (Maqin, 2011).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara merupakan kombinasi dari pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayahnya. Jika semua wilayah dalam negara tersebut menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka negara tersebut juga akan menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk pembangunannya. Suatu daerah yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dapat menyebabkan daerah tersebut tertinggal dalam pembangunan (Sidik, 2011).

Indonesia sendiri terbagi menjadi dua wilayah kawasan yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang terdiri dari provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Kawasan Timur Indonesia (KTI) terdiri dari provinsi Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua (Sholeh, 2014). Jika ditinjau berdasarkan BPS kawasan yang mendapatkan mamfaat pembangunan lebih besar adalah KBI (Sukwika, 2018). Namun, pembangunan

saat ini tidak menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah Kawasan Barat Indonesia, hal ini ditunjukkan pada Gambar 1 dibawah ini yang menunjukkan keadaan laju Pertumbuhan antara KBI dan KTI.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

Gambar 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi KBI dan KTI 2012 - 2021

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Barat Indonesia sendiri menurut data BPS pada tahun 2012 sampai tahun 2021 yang digambarkan dari laju PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 dalam persen justru selalu lebih rendah dari KTI dari 10 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Kawasan Barat Indonesia sebesar 4,09 persen sedangkan Kawasan Timur Indonesia mencapai 5,02 persen bahkan dari tahun 2013 rata-rata pertumbuhan ekonomi KBI mengalami penurunan. Hal ini sangat disayangkan, karena seharusnya pertumbuhan ekonomi yang ada di KBI dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kawasan Barat Indonesia mungkin disebabkan karena kurangnya modal fisik. Asumsi ini di dasari dari teori Solow yang mengatakan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi ada tiga yaitu modal fisik, modal manusia, dan kemajuan teknologi (Makiw, 2006).

Ketersediaan modal fisik sangat terkait dengan ketersediaan dana investasi. Dana investasi dirasa sangat penting untuk pembangunan ekonomi dana investasi yang tersedia dapat memberikan stok modal secara fisik (pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku) atau dengan melakukan investasi terhadap fasilitas-fasilitas penunjang seperti investasi infrastruktur ekonomi dan sosial (pembangunan jalan raya, penyediaan listrik, air bersih, pembangunan fasilitas komunikasi, puskesmas dan sebagainya). Pembangunan infrastruktur sejatinya, berdampak terhadap pertumbuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur sendiri merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang dan juga sebagai sarana penciptaan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Pemberdayaan sumber daya untuk membangun infrastruktur akan memicu proses ekonomi sehingga menimbulkan pengadaan dampak ekonomi maupun sosial (Setiadi, 2006).

Ketidalcukupan infrastruktur inilah yang nantinya menjadi kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi (Ndulu *et al.*, 2005). Dimana jika Infrastruktur ekonomi seperti panjang jalan dalam kondisi tidak baik maka akan mempersulit mobilisasi penyaluran barang dan jasa sehingga akan menghambat akses masyarakat yang terisolasi. Studi empiris Maryaningsih *et al.*, (2014), Warsilan & Noor (2015), law *et al.*, (2018), Arifin & Zulham (2019), Brilyawan & Santosa (2021) yang menunjukkan bahwa Sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan berperan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, temuan empiris Maqin (2011), Sugiarto & Subroto (2019), Hutauruk (2021), Ayu & Muljaningsih (2022) yang menyatakan bahwa infrastruktur jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kajian literatur Nairobi & Respitasari (2021), menyatakan bahwa infrastruktur panjang jalan dalam kondisi yang baik dan sedang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan teori solow yang menyatakan bahwa jalan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menurut solow hanya ada berbagai jenis modal,

Perusahaan berinvestasi dalam berbagai bentuk modal biasa, sedangkan pemerintah berinvestasi dalam berbagai bentuk modal publik, yaitu infrastruktur jalan, jembatan, dan jalur pembangunan. Jika jalan mengalami peningkatan maka PDRB juga akan meningkat karena jalan berpengaruh positif dan signifikan artinya naik turunnya infrastruktur jalan sangat besar pengaruhnya terhadap naik turunnya PDRB. Pemilihan variabel panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang dengan total panjang jalan akan meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dengan daerah terpencil sehingga distribusi faktor produksi, barang, dan jasa akan lebih merata.

Infrastruktur sosial juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kesehatan merupakan prasyarat untuk peningkatan produktivitas dan keberhasilan pendidikan juga bergantung pada kesehatan yang memadai. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dengan pelayanan yang baik serta biaya yang terjangkau (Nairobi & Respitasari, 2021). Studi empiris Warsilan & Noor (2015), Amalia (2019), Nairobi & Respitasari, (2021), Ayu & Muljaningsih (2022) menunjukkan bahwa infrastruktur kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, studi empiris Sugiarto & Subroto (2019), Saputra & Cristianingrum (2021) Brilyawan & Santosa (2021), menyatakan bahwa Infrastruktur kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini kesehatan menggambarkan kualitas sumber daya manusia, Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kualitas produktivitas tenaga kerja dalam proses produksi. Angka harapan hidup yang tinggi tetapi tidak disertai kualitas keahlian dan ketrampilan hanya akan menjadi beban untuk pembangunan.

Kajian literatur Warsilan & Noor (2015) menyatakan bahwa infrastruktur Kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah infrastruktur kesehatan seperti Puskesmas yang ada menunjukkan seberapa besar masyarakat dapat menggunakan puskesmas

tersebut. Semakin banyak jumlah puskesmas yang digunakan menggambarkan seberapa besar akses suatu daerah terhadap puskesmas. Dengan terpenuhinya kualitas prasarana kesehatan yang baik dan memadai, nantinya akan meningkatkan kualitas kesehatan sumber daya manusia. Dampak dari hal ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang produktif dalam bidang tenaga kerja, tenaga kerja belum berkerja yang masih berpendidikan dan lain sebagainya.

Faktor lain yang rentan terkena ketika infrastruktur kurang memadai adalah investasi, hal ini disebabkan karena ketika berinvestasi, investor memeriksa apakah bisnisnya dapat beroperasi dan tumbuh dengan infrastruktur yang ada (Nairobi & Respitasari, 2021). Investasi merupakan penentu penting pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan adanya investasi baru maka memungkinkan terciptanya barang modal baru, sehingga akan menyerap faktor produksi dan menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut, akan merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2004). Investasi dapat dilakukan oleh swasta berupa PMDN dan PMA (Wihda & Poerwono, 2014). Study empiris Maryaningsingsih (2014), Trisnu & Purbadharmaja (2014), Putri (2014), Yunita & Sentosa (2019) menyatakan bahwa investasi PMDN terbukti secara empiris positif dan signifikan sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Disisi lain, Study empiris Wihda & Poerwono (2014), Astuti *at al* (2017), Ramadhania & Muliadi (2018), Yanti & Sutrisna (2021), menunjukkan bahwa investasi PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kajian literatur Trisnu & Purbadharmaja (2014) menunjukkan bahwa Investasi PMDN berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan Sutawijaya (2010) yang menyatakan pertumbuhan investasi swasta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kontribusi investasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi permintaan, yakni peningkatan investasi akan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan

pertumbuhan yang efektif dan dari sisi penawaran, pertumbuhan investasi akan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lebih cadangan modal yang akan berkembang dalam peningkatan kapasitas produksi.

Selanjutnya, Investasi PMA yaitu investasi yang berasal dari luar negeri, Investasi PMA menjadi alternatif penting dalam proses pembiayaan pembangunan (Global Development Finance, 2005), Banyak alasan telah diberikan untuk pentingnya arus masuk PMA, termasuk penciptaan lapangan kerja, pengetahuan teknologi, dan peningkatan daya saing (Kobrin, 2005). Dua perspektif teoretis utama telah digunakan untuk menjelaskan dampak PMA terhadap ekonomi negara tuan rumah yaitu teori modernisasi dan teori ketergantungan. Teori modernisasi didasarkan pada teori pertumbuhan neoklasik dan endogen, yang menunjukkan bahwa PMA dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Perspektif modernisasi didasarkan pada prinsip fundamental dalam ilmu ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan penanaman modal (Adams, 2009). Mengingat manfaat yang diharapkan dari PMA banyak studi telah dilakukan untuk menguji dampak PMA terhadap pertumbuhan ekonomi, pada penelitian Sutawijaya & Zulfahmi (2010), Momongan (2013), Wihda & Poerwono (2014), Prawira *at al* (2019), menunjukkan bahwa PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara studi empiris Adams (2009), Jufrida *at al.*, (2016), Rofi & Ardyan (2017), Rhamadania, Mire & Muliadi (2019) menunjukkan bahwa PMA tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kajian literatur Nasir *at al.*, (2021) menunjukkan bahwa PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kemudahan berinvestasi termasuk fasilitas yang diberikan oleh suatu negara, iklim investasi yang baik dengan birokrasi yang mudah, dan kondisi negara yang aman, akan semakin menarik investor dan menjadikan suatu negara sangat kompetitif untuk menarik investor asing. Besarnya modal yang masuk dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian suatu negara,

dan di dalamnya terdapat transfer teknologi untuk meningkatkan produktivitas negara-negara tersebut yang kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Disisi lain, salah satu badan usaha yang menghubungkan antara investor dan pengusaha adalah perbankan. Perbankan adalah media yang menjembatani antara sektor moneter dengan sektor riil (Nurjannah & Nurhayati, 2017). Dalam lingkup perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sendiri adalah penyaluran kredit. Hal ini didukung juga dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa dengan penyaluran kredit oleh bank mampu meningkatkan sisi konsumsi dan sisi investasi yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kredit yang dikeluarkan bank adalah kredit konsumsi. Jika ditinjau dari sisi kredit non produktif ini adalah semakin besar kredit konsumtif yang tersalurkan maka otomatis akan menambah daya beli masyarakat sehingga jika daya beli masyarakat naik maka demand terhadap produk juga akan mengalami kenaikan dan dari sisi supply maka banyak yang terserap sehingga produsen akan menghasilkan barang yang lebih banyak lagi dan akibatnya pertumbuhan ekonomi meningkat (Apriliyani & Taufik, 2022). Pada penelitian Rachman & Sriyanto (2012), Sari *at al.*, (2016), Dewi & Abdullah (2018), Dwiastuti (2020), menunjukkan bahwa kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, disisi lain, Pada penelitian Hayet (2016), Nurjanah & Nurhayati (2018), Maherika *at al* (2019), Apriliyani & Taufik (2022), menunjukkan bahwa kredit konsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kajian literatur Dwiastuti (2020), menunjukkan bahwa kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit konsumsi untuk individu atau perorangan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan yang paling banyak digunakan untuk pembelian rumah, kendaraan dan lain – lainnya. Dengan adanya kredit konsumsi maka permintaan akan meningkat sehingga produksi juga harus ditingkatkan maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya masalah pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan barat Indonesia dan adanya penelitian terdahulu yang memiliki hasil berbeda-beda pada variabel-variabelnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh infrastruktur, investasi dan kredit terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Suatu negara akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya perekonomian yang meningkat begitupun sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif akan menunjukkan penurunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan wujud agregat dari pertumbuhan ekonomi tiap wilayahnya. Dimana jika tiap wilayahnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Struktur ekonomi wilayah Kawasan Barat Indonesia sendiri dari Tahun 2012 sampai tahun 2021 dilihat dari data BPS menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini menunjukkan adanya perekonomian yang terhambat, terhambatnya perekonomian mungkin disebabkan karena kurangnya beberapa faktor seperti, modal fisik penunjang perekonomian seperti Infrastruktur panjang jalan dan infrastruktur Kesehatan. Padahal kurangnya Infrastruktur akan menghambat investasi sebagai modal pendorong perekonomian. Dampak dari masalah ini menimbulkan kurangnya stok modal, sehingga perbankan sebagai jembatan untuk mengatasinya yaitu dengan pemberian kredit. Berdasarkan perumusan masalah, maka dapat disusun pertanyaan sebagai berikut:

- 1 Apakah infrastruktur panjang jalan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia 2012-2021?
- 2 Apakah infrastruktur kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia 2012-2021?
- 3 Apakah investasi PMDN berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia 2012-2021?

- 4 Apakah investasi PMA berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia 2012-2021?
- 5 Apakah kredit konsumsi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia 2012-2021?

C. Pembatasan masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu pengaruh infrastruktur, investasi dan kredit terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia, yang meliputi infrastruktur ekonomi, infrastruktur kesehatan, investasi PMDN, investasi PMA, kredit konsumsi. Data observasi kawasan barat Indonesia 2012-2021 pengambilan data dari tahun 2012-2021 dikarenakan adanya keterbatasan data yang ada sehingga peneliti menggunakan data dari tahun 2012-2021.

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1 Tujuan penelitian

- a) Menganalisis pengaruh infrastruktur panjang jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia 2012-2021.
- b) Menganalisis pengaruh infrastruktur kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia 2012-2021.
- c) Menganalisis pengaruh investasi PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia 2012-2021.
- d) Menganalisis pengaruh investasi PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia 2012-2021.
- e) Menganalisis pengaruh kredit konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia 2012-2021.

2 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan membuktikan apakah teori

Infrastruktur, teori Investasi serta teori kredit berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Barat Indonesia.

2 Kegunaan Praktis

- a) Bagi pemerintah pusat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan masukan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan Pertumbuhan Ekonomi antar Kawasan Indonesia.
- b) Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam proses pembangunan daerah.
- c) Bagi PUPR penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam proses pembangunan daerah.
- d) Bagi lembaga pengelola investasi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam proses pembangunan daerah.
- e) Bagi lembaga keuangan penelitian ini diharapkan sebagai pengambil kebijakan dalam keputusan pemberian kredit terhadap nasabah.